Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syariah

Dicky Raka Perdana^{*}, Eva Fauziah, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dickyrakaperdana@gmail.com, evamawardi@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

Abstract. Cooperatives are joint businesses that in carrying out their business activities involve all existing members as mutual cooperation as in the activities of a family. Currently, cooperatives have new regulations or rules contained in Article 86 of the Job Creation Law. There has been a law reform in this cooperative regulation. One of them is a new rule regarding sharia cooperatives, which previously did not have clear rules regarding this sharia cooperative. The purpose of this study is to find out the provisions of cooperatives in Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives and Article 86 of the Job Creation Law and their impact after the enactment of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The result of this research is that there are rules or regulations that are added and replaced in the new regulation, namely Article 86 of the Job Creation Law due to legal reforms so that it has an impact on Islamic cooperatives that are given more attention by the government.

Keywords: *Cooperatives, Constitution, Law reform.*

Abstrak. Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Saat ini koperasi telah mempunyai regulasi atau aturan baru yang terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam aturan koperasi ini. Salah satunya terdapat aturan baru mengenai Koperasi syariah yang sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas mengenai koperasi syariah ini. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta kerja serta dampaknya setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru yaitu Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan telah adanya pembaharuan hukum sehingga berdampak pada koperasi syariah yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Koperasi, Undang-Undang, Pembaharuan Hukum.*

A. Pendahuluan

Koperasi memainkan peran penting dalam pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan dapat mendorong kehidupan ekonomi yang demokratis, inklusif, dan kooperatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti dari identitas koperasi ialah semangat kekeluargaan dan kerjasama timbal balik dalam mendirikan usaha bersama, sebagaimana konstitusi mendefinisikan Demokrasi Ekonomi. Koperasi kini dihadapkan pada dua masalah sekaligus. Pertama, koperasi harus meningkatkan daya saing dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi sebagai fondasi perusahaannya agar berhasil dalam ekonomi digital. Apalagi koperasi di Indonesia menghadapi kebijakan hukum baru, Omnibus Law.[1]

Pertumbuhan koperasi di Indonesia secara periodik ditandai dengan dinamika yang terlihat dari kebijakan pemerintah yang selalu berubah. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai pada tahun 1896 dan terus berlanjut hingga saat ini. Walaupun dalam pergerakannya koperasi koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, dengan seluruh ruang lingkup kegiatan komersial berfluktuasi sesuai dengan lingkungannya.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), koperasi dan UMKM menjadi salah satu hal penting dalam keberhasilan investasi, yang merupakan tujuan utama adanya UU Ciptaker melalui Omnibus Law. Menurut pemerintah, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan omnibus law: 1) Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan; 2) Efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. 3) Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UU Ciptaker terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.[3]

Kemudahan berusaha ialah salah satu faktor yang mendasari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudahan berusaha tersebut mengandung arti bahwa penciptaan lapangan kerja yang didukung oleh proses bisnis yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, dan pembentukan koperasi untuk mendorong perekonomian Indonesia.[4]

Terdapat beberapa perbedaan isi yang ada didalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya yaitu, didalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 orang. Didalam Pasal 86 Undang-undang Cipta kerja koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 9 orang, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 orang.

Selain perbedaan itu ada juga perbedaan lain diantara kedua Undang-undang tersebut yaitu didalam Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak diatur secara jelas tentang bagaimana cara pendirian koperasi syariah, sedangkan dalam Pasal 86 Undang-undang Cipta kerja disisipkan aturan mengenai koperasi syariah yaitu terdapat dalam pasal 44A.

Pengesahan UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 memberikan beberapa keuntungan bagi koperasi untuk memperluas operasi komersialnya. Koperasi yang beranggotakan UMKM terus disebut-sebut sebagai soko guru perekonomian negara. Sejak terbitnya UU No 11 Tahun 2020, bantuan pemerintah kepada koperasi semakin meningkat. Hal ini dipadukan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020 dan resmi menjadi Undang-Undang No.11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk masyarakat untuk menjalankan usaha syariah atau Koperasi Syariah karena pendirian koperasi menjadi lebih mudah dan adanya kepastian hukum. Akan tetapi disisi lain belum tentu Undang-Undang ini lebih baik daripada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa saja perbedaan peraturan koperasi yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-undang Cipta kerja? dan Bagaimana dampak pemberlakuan Pasal 86 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Koperasi Syariah terhadap perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan pasal 86 Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui perbedaan aturan koperasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan pasal 86 Undang-Undang tentang Cipta kerja.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberlakuan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Koperasi Syariah terhadap perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia saat ini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan, serta menelaah teori-teori, konsep-konsep peraturan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai analisis perbandingan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dengan pasal 86 Undang-undang Cipta Kerja tentang Koperasi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga teknis pengumpulan datanya memakai studi pustaka, yaitu membaca serta mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Peraturan Koperasi yang Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam aturan tentang koperasi pemerintah telah mengeluarkan aturan baru, yaitu dalam pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja, sebelumnya aturan mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, didalam Undang-Undang itu berisi tentang cara pengoperasian atau regulasi mengenai koperasi.

Berikut ini ketentuan-ketentuan koperasi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja.

Tabel 1. Ketentuan koperasi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Koperasi
Perangkat organisasi terdiri dari : a. rapat anggota, b. pengurus, c. pengawas.	(Pasal 86 Nomor 3 ayat 2) Selain memiliki perangkat organisasi koperasi, koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengwas syariah.
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.	(Pasal 86 Nomor 5 ayat 1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota

Lanjutan Tabel 1. Ketentuan koperasi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Koperasi
Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.	(Pasal 86 Nomor 1 ayat 2) Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih.
Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.	(Pasal 86 Nomor 4 ayat 3) Rapat anggota dapat dilakukan secara daring
Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi	
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar asas kekeluargaan.	

Produk pembaharuan hukum tentang koperasi yang telah dikeluarkan ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya memperhatikan perkembangan koperasi. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat dan juga bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam tujuan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan Yang Terdapat didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Koperasi Syariah

Terdapat perbedaan aturan atau regulasi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja.

Ada beberapa aturan yang diubah atau ditambahkan yang terdapat di Pasal 86 Undang-Undang cipta kerja mulai dari syarat minimum pembentukan koperasi baru hingga mekanisme rapat anggota koperasi. Selain itu juga didalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta kerja terdapat aturan yang mengatur mengenai Koperasi Syariah yang sebelumnya tidak diatur secara jelas. Didalam pasal 86 undang-undang cipta kerja disisipkan satu pasal, yakni pasal 44A yang berisi mengenai koperasi dengan prinsip syariah. Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tidak terdapat pasal atau aturan secara spesifik mengenai regulasi koperasi syariah.

Berikut ini merupakan tabel perbedaan atau aturan baru yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-undang Cipta kerja terkait koperasi.

Tabel 2. Perbedaan atau aturan baru yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-undang Cipta kerja terkait koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Koperasi	Perbedaan
<p>(Pasal 6)</p> <p>1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.</p> <p>2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p>	<p>1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) orang.</p> <p>2. Koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) orang.</p>	<p>Diaturan lama syarat pendirian koperasi primer minimal 20 orang sedangkan diaturan baru koperasi primer dapat dibentuk dengan minimal 9 orang saja.</p>
<p>(Pasal 21)</p> <p>Perangkat organisasi koperasi terdiri dari: a. Rapat anggota, b. pengurus, c. pengawas.</p>	<p>1. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas: a. Rapat anggota, b pengurus, dan c. pengawas.</p> <p>2. Selain memiliki perangkat organisasi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.</p>	<p>Didalam aturan baru terdapat penambahan poin yaitu mengenai koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.</p>
<p>(Pasal 22)</p> <p>1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.</p> <p>2. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.</p> <p>Rapat anggota menetapkan ;</p> <p>a. anggaran dasar, b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi, c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, e. pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, f. pembagian sisa hasil usaha, g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.</p>	<p>1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.</p> <p>2. Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.</p> <p>3. Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.</p>	<p>Ada pembaharuan aturan yang terdapat di pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mengenai rapat anggota yang dapat dilakukan secara daring dimana sebelumnya aturan itu tidak terdapat di Undang-Undang No.25 TahunU1992 tentang Perkoperasian. Namun didalam aturan lama banyak membahas mengenai penetapan rapat anggota.</p>

Lanjutan Tabel 2. Perbedaan atau aturan baru yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-undang Cipta kerja terkait koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Koperasi	Perbedaan
<p>(Pasal 43)</p> <p>1. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.</p> <p>2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.</p> <p>3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.</p>	<p>1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.</p> <p>2. Usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.</p> <p>3. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi.</p> <p>4. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.</p>	<p>Terdapat penambahan poin didalam aturan baru yaitu mengenai pelaksanaan usaha koperasi yang dapat dilaksanakan secara tunggal usaha.</p>

Pembaharuan hukum atau juga biasa disebut reformasi hukum ini bukan sekedar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui perubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu system hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan yaitu Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan pasan 86 Undang-undang Cipta kerja terkait koperasi syariah menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat, dan menjadi lebih pasti menurut hukum.

Dampak Pemberlakuan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perkembangan Koperasi

Sesuai dengan teori perbandingan hukum, kedua regulasi tersebut mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu dapat mendukung perkembangan ilmu hukum serta dapat memberikan masukan positif dalam usaha pembaharuan hukum. Selain itu dapat mengumpulkan pengetahuan baru dan juga memperoleh gambaran yang lebih baik tentang hukum itu sendiri, karena dengan membandingkan kita bisa melihat masalah-masalah tertentu untuk meyempurnakan pemecah tertentu di dalam hukum sendiri. Regulasi mengenai koperasi yang baru ini tentunya sesuai dari keinginan masyarakat agar pemerintah lebih memperhatikan

lagi koperasi ini, regulasi yang baru ini melengkapi dan juga menambahkan aturan yang sebelumnya kurang jelas atau bahkan tidak ada sehingga aturan ini seharusnya dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk lebih memperhatikan koperasi ini.

Indonesia yang merupakan Negara muslim terbesar di dunia yang seharusnya dapat lebih mudah untuk mengembangkan kegiatan usaha koperasi syariah nampaknya tidak mudah. Walaupun menurut data dari kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah koperasi syariah mengalami perkembangan positif dilihat dari jumlah koperasi syariah di Indonesia yang meningkat tidak sejalan dengan eksistensi koperasi syariah yang masih minim digandrungi oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan daya tarik masyarakat terhadap koperasi syariah yang masih rendah.

Koperasi syariah memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dengan syarat semua pihak mulai dari pemerintah hingga pengurus koperasi mau untuk merencanakan solusi untuk meningkatkan koperasi syariah, dengan melakukan digitalisasi, pengembangan program sosial, dan pemberdayaan usaha sehingga dapat mensejahterakan umat dan dapat peningkatan positif.

Disahkannya Undang-Undang Cipta kerja oleh pemerintah, Undang-undang Cipta Kerja Pasal 86 tentang koperasi ini akan memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk masyarakat untuk menjalankan usaha syariah atau koperasi syariah, karena pendirian koperasi syariah menjadi lebih mudah dan adanya kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan koperasi didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah ada pembaharuan hukum dan dituangkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja, didalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa aturan yang ditambahkan ataupun diganti. Produk pembaharuan hukum ini merupakan salah satu bentuk dari pemerintah untuk memperhatikan koperasi syariah dan lebih khususnya yaitu koperasi syariah. Dalam upaya memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
2. Terdapat perbedaan aturan regulasi mengenai koperasi didalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Ada aturan atau regulasi yang ditambahkan dan juga diganti. Hal ini disebabkan telah adanya pembaharuan hukum mengenai koperasi ini. Ada beberapa perbedaan yang terdapat didalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dimulai dengan syarat pendirian koperasi yang sebelumnya didalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang sekarang dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja koperasi primer bisa dibentuk sekurang-kurangnya oleh 9 orang. Hingga kemudian didalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat aturan atau regulasi mengenai Koperasi syariah pada aturan sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas mengenai koperasi syariah ini. Pembaharuan hukum ini dilakukan atas dasar berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan juga kecenderungan masyarakat yang mulai mengenal koperasi berbasis syariah.
3. Diberlakukannya Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi koperasi syariah yaitu koperasi syariah dapat mempunyai aturan atau regulasi yang jelas sehingga koperasi syariah memiliki pakem dalam menjalankan kegiatan usahanya. Regulasi baru mengenai koperasi syariah ini diharapkan dapat melengkapi atau menambahkan aturan yang sebelumnya kurang jelas atau bahkan tidak ada sehingga aturan ini menjadi pemicu masyarakat untuk mau menggunakan jasa koperasi syariah.

Acknowledge

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas segala rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tidak pernah putus, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan baik moril, materi, kritik, saran, dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti sehingga tugas akhir dapat selesai. Peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam serta karunianya sehingga peneliti dapat terus dimudahkan dalam Menyusun penelitian ini.
2. Orang tua peneliti yang sangat supportive, selalu mendukung, memberi doa, kasih sayang dan motivasinya tanpa henti kepada peneliti.
3. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M. Ag selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah membantu proses pembuatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. B. Nugraha, "Politik Hukum Terhadap Koperasi Indonesia," *J. Cakrawala*.
- [2] H.Masngudi, *Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi, 1990.
- [3] Herman Suryokumoro, "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law," *Mulawarman Law Rev.*, vol. 5, no. 2, p. hlm. 81, 2020.
- [4] R. T. S. R. Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- [5] Gantara Franky, Anshori Arif Rijal. (2022). *Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 99-104.